

Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di SMA Kristen Petra 5 Kota Surabaya

Veronica Aditya Rahayu Ningtyas

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail : veronicaadty296@gmail.com

Article History:

Received: 01 Januari 2025

Revised: 23 Januari 2025

Accepted: 26 Januari 2025

Keywords: *Pemilih Pemula, Pendidikan Politik, Sosialisasi*

Abstrak: *Kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa SMA Kristen Petra 5 Surabaya mengenai pentingnya pemilu dan peran mereka dalam demokrasi. Metode yang digunakan meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan simulasi pemilu, yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep dasar pemilu, proses pelaksanaan, serta pentingnya memilih secara bijak. Antusiasme siswa mencerminkan keberhasilan metode yang diterapkan, terutama karena mereka akan berpartisipasi dalam pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 2024. Dengan pemahaman yang lebih baik, siswa diharapkan mampu menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, serta mendukung keberlanjutan demokrasi yang adil dan transparan di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia meraih kemerdekaan, banyak kemajuan dan perubahan yang terjadi, menjadikan negara ini terus berkembang. Perubahan tersebut memberikan berbagai manfaat, seperti kemajuan masyarakat, perkembangan teknologi yang semakin pesat, serta peningkatan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang efisien dan cepat menjadi impian setiap negara karena dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demikian, diperlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti sumber daya manusia yang kompeten dan ahli, infrastruktur yang memadai, serta penerapan teknologi canggih dalam sistem pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) memegang peranan penting untuk mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang adil dan efektif. Melalui pemilu, pemimpin-pemimpin yang berintegritas dan memiliki visi pembangunan dapat terpilih, sehingga menjadi landasan kokoh bagi tercapainya pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu adalah wadah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pemilihan umum (pemilu)

merupakan momen penting dalam sistem demokrasi karena menjadi proses utama untuk menentukan arah kebijakan dan pembangunan sebuah negara selama lima tahun ke depan. Melalui pemilu, masyarakat berkesempatan untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan mengambil keputusan. berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Bagi pemilih pemula, yang mungkin baru pertama kali terlibat dalam proses pemilu, partisipasi aktif mereka sangat diharapkan. Menggunakan hak pilih dengan bijak merupakan bentuk kontribusi nyata dalam membangun bangsa. Pemilih pemula perlu memahami bahwa pilihannya tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga masa depan masyarakat dan negara.

Pemilihan pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat membawa perubahan signifikan dengan memperkuat hubungan antara pemilih dan kandidat. Interaksi yang lebih intens dapat terjalin melalui proses dialog yang lebih dekat, sekaligus menyederhanakan jalur administratif politik yang biasanya panjang dalam sistem perwakilan melalui lembaga legislatif. Dalam konteks yang lebih spesifik, mekanisme ini mengembalikan hak dasar masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dalam proses politik, terutama di tingkat politik lokal yang demokratis (Suhartono et al., 2019).

Era pemilihan umum serentak dan langsung di Indonesia dimulai pada tahun 2004 sebagai salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi. Pemilu langsung memberikan hak kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin mereka. tanpa perwakilan di lembaga legislatif. Sistem ini diperkenalkan pada tahun 2004 dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, menandai tonggak sejarah baru setelah sebelumnya kepala negara dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilihan langsung kemudian secara bertahap diterapkan pada berbagai tingkat pemerintahan, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Konsep ini didasarkan pada asas demokrasi yang mengedepankan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER), serta jujur dan adil (JURDIL). Pemilu langsung bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan memperkuat legitimasi pemimpin yang terpilih. Pelaksanaan pemilu serentak juga merupakan langkah maju dalam efisiensi demokrasi, karena menggabungkan jadwal pemilu di berbagai tingkatan dalam satu waktu. Hal ini tidak hanya menghemat anggaran negara, tetapi juga mengurangi potensi konflik politik akibat ketegangan yang berlarut-larut. Dengan menerapkan sistem ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat sistem demokrasinya.

Meski demikian, tantangan seperti masalah teknis, logistik, dan potensi politik uang masih perlu diatasi agar pemilu semakin berkualitas dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Praktik jual beli suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), yang biasa disebut sebagai politik uang atau politik transaksional, merupakan salah satu penghambat demokrasi yang serius (Hamson, 2021). Praktik ini merusak prinsip-prinsip keadilan dan integritas Pemilu, karena suara rakyat tidak lagi mencerminkan aspirasi atau penilaian terhadap kualitas kandidat, melainkan menjadi objek transaksi materi. Politik uang menciptakan ketergantungan antara kandidat dan pemilih, mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, dan berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten atau tidak bertanggung jawab. Selain itu, praktik ini juga sering kali melibatkan pelanggaran hukum dan etika, serta memperparah masalah korupsi di tingkat pemerintahan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2022) Praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor utama. Salah satunya adalah kemampuan finansial kandidat, di mana kandidat dengan sumber daya yang besar lebih mungkin memberikan insentif kepada pemilih untuk mendapatkan dukungan, sehingga menciptakan ketidaksetaraan

akses dalam politik. Selain itu, budaya politik dan norma sosial juga menjadi penyebab utama, terutama di daerah-daerah tertentu yang masih menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah. Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa praktik ini adalah hal yang wajar juga semakin memperkuat keberadaannya. Faktor lainnya adalah lemahnya penegakan hukum, dengan tidak adanya sanksi yang tegas dan penindakan hukum yang efektif, sehingga memberikan rasa aman bagi para pelaku untuk terus melakukan praktik ini. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam pemilu, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan penegakan hukum.

Partisipasi politik dalam pemilu memainkan peran penting dalam membangun legitimasi kandidat terpilih. Ketika masyarakat berpartisipasi aktif melalui pemungutan suara, secara tidak langsung mereka memberikan dukungan moral dan sosial terhadap proses dan hasil pemilu. Tingkat partisipasi yang tinggi mengindikasikan bahwa masyarakat merasa dilibatkan dan mempercayai mekanisme demokrasi yang ada, sehingga pasangan calon yang terpilih dianggap memiliki mandat yang kuat untuk memimpin. Sebaliknya, jika partisipasi rendah, maka legitimasi pasangan calon dapat dipertanyakan karena dianggap kurang mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan. Untuk meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan kesadaran politik, pendidikan politik merupakan salah satu cara yang efektif. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi, mendapatkan informasi yang akurat, dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, sehingga tercipta partisipasi politik yang lebih bermakna dan legitimasi yang lebih kuat bagi para pemimpin yang terpilih.

Pemilih pemula adalah Kelompok generasi baru yang memiliki ciri khas, sifat, latar belakang, pengalaman, serta tantangan yang berbeda dibandingkan dengan pemilih dari generasi sebelumnya. (Nur Wardhani, 2018). Pendapat pemilih pemula perlu dibimbing agar mereka dapat menyalurkan aspirasinya dengan tepat, sehingga pemilu berlangsung sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, Bakesbangpol Kota Surabaya mendukung kegiatan sosialisasi pemilu yang ditujukan bagi pemilih pemula.

Tujuan dari sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman dan wawasan politik kepada pemilih pemula, sehingga mereka menyadari pentingnya menggunakan hak pilih mereka. pada Pemilu 2024. Peserta sosialisasi ini adalah siswa-siswi kelas XII SMA Kristen Petra 5 Kota Surabaya. Sosialisasi Pemilu berperan sebagai sarana pendidikan politik untuk menciptakan partisipasi politik masyarakat yang lebih berkualitas dan bermutu. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi peserta untuk menjadi generasi yang idealis dan berkualitas. Pendidikan politik memberikan wawasan tentang etika dan budaya politik yang mencerminkan nilai-nilai budaya positif dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Kegiatan ini dilakukan melalui metode penyampaian materi yang dilanjutkan dengan diskusi.

Pendidikan politik bertujuan utama untuk menciptakan masyarakat yang melek politik, ditandai dengan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban dalam menyampaikan aspirasi politik, partisipasi aktif, rasa tanggung jawab, serta kemampuan bekerja sama demi kemajuan bersama. Bagi pemilih pemula, pendidikan politik memiliki peran penting karena mereka baru pertama kali berpartisipasi dalam pemilu. Langkah ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran kritis mereka dan mendorong pengambilan keputusan yang bijak dalam menentukan pilihan.

LANDASAN TEORI

Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu elemen utama dalam sebuah negara demokrasi. Proses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dengan memilih wakil-wakil yang akan mengelola pemerintahan. (Taufiqurrahman & Amal, 2022). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah proses demokratis yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil mereka yang akan menjalankan pemerintahan. Pemilu berfungsi sebagai sarana utama dalam sistem demokrasi, karena memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam penentuan kebijakan dan pemimpin yang akan mewakili aspirasi mereka. Dengan demikian, pemilu merupakan mekanisme yang menjamin kekuasaan berasal dari rakyat, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam negara demokratis.

Mengutip dari (DN et al., 2016) Pemilu memiliki lima fungsi utama dalam sistem politik suatu negara. Fungsi-fungsi ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berikut adalah kelima fungsi tersebut:

- a. Mengatur mekanisme atau tata cara penentuan seseorang untuk menjadi anggota perwakilan rakyat atau kepala pemerintahan.
- b. Mengatur mekanisme pergantian atau sirkulasi elit politik yang berkuasa.
- c. Mewakili kepentingan rakyat atau konstituen, serta berperan dalam memantau, mengevaluasi, dan mengontrol perilaku pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan program-program pembangunan.
- d. Memberikan legitimasi politik, yaitu legitimasi dan hak moral bagi para pemimpin untuk menjalankan kekuasaannya. Hak ini mencakup kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuasaan negara atas dasar moral yang sah.
- e. Berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Proses dan praktik politik yang berlangsung selama dan menjelang pemilu menjadi momen penting untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan politik yang luas kepada masyarakat.

Sosialisasi Politik

Pada dasarnya, sosialisasi politik adalah proses memperkenalkan sistem politik kepada seseorang dan membentuk cara mereka merespons dan bereaksi terhadap berbagai fenomena politik. Istilah "sosialisasi" digunakan oleh beberapa ahli ilmu sosial untuk menggambarkan proses di mana anak-anak dikenalkan dengan nilai-nilai dan sikap yang dianut oleh masyarakat mereka, serta bagaimana mereka belajar peran yang diharapkan dapat mereka mainkan ketika mereka dewasa. (Zuhri, 2010).

Proses menginternalisasi ide, gagasan, konsep, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dan efektif dalam kelompok atau institusi politik dikenal sebagai sosialisasi politik. (Sumantri, 2018). Sosialisasi politik untuk pemilih pemula bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan generasi muda untuk berpikir kritis tentang cara memberikan suara dan berpartisipasi dalam pemilu yang bebas dari politik uang dan bersih. (Ardiani et al., 2019).

Pengertian Pendidikan Politik

Definisi pendidikan politik memiliki berbagai macam penafsiran. Selain itu, perbedaan antara pendidikan politik dan sosialisasi politik juga sering memicu berbagai penafsiran. Namun demikian, perbedaan tersebut tidak mengurangi pemahaman akan pentingnya pendidikan politik.

Banyak ahli yang mencoba menjelaskan konsep dasar pendidikan politik melalui berbagai pandangannya. Menurut (Sutrisman, 2019) Pendidikan politik juga dikenal dengan istilah political forming atau Bildung. Istilah forming digunakan karena memiliki tujuan untuk membentuk individu menjadi manusia politik yang menyadari peran dan kedudukannya dalam masyarakat. Sementara itu, istilah Bildung merujuk pada proses pembentukan atau pendidikan diri sendiri, yang melibatkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi dalam menjadi bagian dari dunia politik.

Mengutip dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati & Rafni, 2020) Definisi pendidikan politik mencakup tiga elemen utama. Pertama, melibatkan upaya memberikan pelatihan, pengajaran, dan bimbingan untuk mengembangkan kapasitas serta potensi individu. Kedua, proses tersebut harus dilakukan secara dialogis dan sukarela melalui interaksi rutin antara pengirim dan penerima pesan. Ketiga, tujuan dari upaya ini adalah agar penerima pesan memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan politik.

Dari beberapa pendapat di atas, meskipun beragam, dapat ditarik sebuah garis lurus bahwa pendidikan politik bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kesadaran akan peran, hak, dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat politik. Pendidikan politik tidak hanya berkenaan dengan pengetahuan tentang sistem politik, tetapi juga menyangkut proses pembentukan sikap dan nilai-nilai yang mendukung partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Hal ini mencakup kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan yang tepat, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai definisi dan pendekatan pendidikan politik, para ahli sepakat bahwa proses ini bersifat dinamis, dialogis, dan partisipatoris. Dengan demikian, pendidikan politik memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar, peduli, dan terlibat aktif dalam pembangunan politik dan sosial.

Bentuk Pendidikan Politik

Pelaksanaan pendidikan politik sangat beragam dan tergantung pada siapa yang melaksanakan atau siapa yang menjadi subjeknya. Menurut (Kantaprawira, 1983), Pendidikan politik dapat diberikan melalui berbagai sumber. Yang pertama adalah media cetak, seperti koran, majalah, dan publikasi lainnya yang berfungsi untuk membentuk opini publik; yang kedua adalah media audio-visual, seperti radio, televisi, dan film; dan yang ketiga adalah lembaga sosial atau organisasi, termasuk tempat ibadah seperti masjid dan gereja yang memberikan khotbah, serta lembaga pendidikan formal dan informal.

Menurut Kavang (1998), Ada dua jenis bentuk dan proses sosialisasi politik atau pendidikan politik. Yang pertama adalah laten atau tersembunyi. Kegiatan ini terjadi di lembaga sosial non-politik seperti keluarga, komunitas sosial, kegiatan keagamaan, lingkungan kerja, dan sekolah atau kampus. Yang kedua adalah terang-terangan. Kegiatan ini terjadi di institusi politik tertentu, seperti pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya.

Tujuan Pendidikan Politik

Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga mereka lebih memahami politik, lebih kreatif, dan mampu berperan aktif secara positif dalam kegiatan politik dan pembangunan. Diharapkan bahwa pendidikan politik akan membentuk orang-orang yang bertanggung jawab atas bangsa dan negara mereka. (Sumanto & Haryanti, 2021). Menurut (Ruslan et al., 2000) Membangun kepribadian politik dan kesadaran politik serta meningkatkan kemampuan setiap orang untuk berpartisipasi secara positif dalam kegiatan politik adalah tujuan pendidikan politik. Fokus utama pendidikan politik adalah kepribadian politik. Ia

berpendapat bahwa kepribadian politik adalah bagian dari kesadaran politik, dan jenis budaya politik yang membentuk kepribadian tersebut membentuk bentuk dan tingkat partisipasi politik seseorang. Menurut (Kartono, 1989), ada dua tujuan pendidikan politik, yaitu:

1. Membekali masyarakat individu, klien, mahasiswa, dan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memahami dinamika sosial-politik yang penuh konflik, memberikan masukan yang membangun terhadap ketidakstabilan dalam masyarakat, berpartisipasi dalam proses demokrasi yang sejati, serta memiliki kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan bersama.
2. Memastikan bahwa peran setiap individu sebagai warga negara dihargai, dengan mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki, baik dalam aspek pengetahuan, wawasan, sikap, maupun keterampilan, diharapkan mereka dapat berperan serta secara aktif dalam dinamika politik. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung kemajuan pembangunan bangsa dan negara.

METODE

Sosialisasi yang dilakukan melalui pemaparan dan dialog interaktif merupakan pendekatan yang menggabungkan penyampaian informasi secara sistematis dengan komunikasi dua arah. Pada tahap pemaparan, narasumber memberikan penjelasan atau informasi dasar kepada audiens secara terstruktur dengan menggunakan alat bantu seperti presentasi atau bahan pendukung lainnya, untuk memastikan pemahaman yang jelas. Setelah itu, dilakukan dialog interaktif dimana audiens diberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan pendapat, atau mendiskusikan materi yang telah dipresentasikan. Dialog ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif, memperdalam pemahaman, dan memastikan bahwa pesan yang disosialisasikan benar-benar diterima dan dipahami. Metode ini sangat efektif untuk menciptakan keterlibatan audiens, karena memungkinkan mereka untuk terlibat langsung dalam diskusi dan mendapatkan klarifikasi atas hal-hal yang belum mereka pahami, sehingga memperkuat pemahaman mereka terhadap informasi yang diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Pengetahuan Dasar Siswa Mengenai Pemilihan Umum

Untuk mengukur pemahaman dasar siswa mengenai pemilihan umum, kegiatan dimulai dengan pemateri yang mengajukan beberapa pertanyaan lisan kepada siswa. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan konsep dasar pemilu, seperti apa itu pemilu, tujuan pemilu, siapa saja yang terlibat dalam pemilu, serta bagaimana proses pemilu berjalan. Siswa diberikan waktu untuk berpikir dan merespons pertanyaan tersebut dengan penjelasan mereka sendiri.

Setelah beberapa pertanyaan diajukan, pemateri memberikan kesempatan kepada tiga orang siswa untuk menyampaikan pemahaman mereka tentang pemilu secara lisan. Masing-masing siswa diberi waktu untuk menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang pemilu, apakah itu mengenai pengertian pemilu, pentingnya pemilu, atau proses-proses yang terjadi dalam pemilu. Bagi siswa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menjawab secara langsung, pemahaman mereka tetap dapat dilihat melalui hasil jawaban yang disampaikan lisan. Pemateri akan mengamati bagaimana siswa menjawab pertanyaan dan mengevaluasi tingkat pemahaman mereka berdasarkan jawaban yang diberikan.

Dari hasil diskusi ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dasar siswa tentang pemilu bervariasi. Beberapa siswa menjawab bahwa pemilu adalah kegiatan memilih pemimpin, seperti

presiden, gubernur, dan bupati. Ada juga yang menyebutkan bahwa pemilu adalah cara bagi orang untuk mendapatkan kekuasaan. Sementara itu, ada pula yang menganggap pemilu adalah kegiatan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Dari sini, pemateri bisa mengidentifikasi bahwa pemahaman siswa tentang pemilu masih beragam, dengan beberapa jawaban yang lebih tepat dan beberapa jawaban yang perlu diluruskan atau diperjelas. Diskusi dan penjelasan lebih lanjut kemudian diberikan untuk memastikan bahwa semua siswa memahami pemilu sebagai proses demokratis yang melibatkan pemilihan pemimpin dan wakil rakyat sesuai dengan sistem yang berlaku di negara tersebut.

Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

Setelah siswa memahami konsep dasar mengenai pemilihan umum, langkah berikutnya adalah melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula. Tahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Pemateri menjelaskan bahwa pemilu merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menentukan kebijakan negara. Pemilu tidak hanya sekadar memilih, melainkan juga menjadi wadah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Setiap warga negara Indonesia harus memahami berbagai hal penting tentang dasar pemilu. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi pedoman untuk penyelenggaraan pemilu yang menekankan demokrasi, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Selain itu, Undang-Undang Pemilu, seperti UU No. 7 Tahun 2017, mengatur banyak hal terkait pemilu, mulai dari sistem pemilihan hingga hak dan kewajiban pemilih, serta cara untuk mengawasi dan melaporkan hasil pemilu. Warga Negara Indonesia (WNI) harus berusia 17 tahun atau sudah atau pernah menikah dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hanya pemilih yang terdaftar dalam DPT yang berhak memberikan suara. Seseorang dapat mengecek DPT secara online melalui situs resmi KPU untuk memastikan apakah mereka sudah terdaftar sebagai pemilih.

Dalam proses pemungutan suara, penting bagi pemilih untuk memahami denah TPS yang menunjukkan lokasi bilik suara, petugas, dan kotak suara. Pemilih juga perlu memastikan bahwa mereka tiba di TPS tepat waktu untuk memberikan suara. Selain itu, agar suara yang diberikan sah, pemilih harus mencoblos sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan di surat suara. Untuk menjadi pemilih yang bijak, penting untuk mempelajari kandidat dan partai yang bertarung dalam pemilu, sehingga Anda dapat memilih berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak mereka. Selain itu, pemilih juga harus menjaga kerahasiaan pilihannya setelah memberikan suara. Dengan mengikuti tips-tips ini, pemilih dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan bijak, memastikan bahwa suara mereka dihitung dengan benar, dan berkontribusi pada demokrasi yang adil dan transparan.

Selain itu, pemateri mengingatkan siswa bahwa sebagai warga negara, mereka memiliki hak untuk memilih dalam pemilu. Namun, hak ini harus disertai dengan kewajiban untuk memilih secara bijak, dengan mempertimbangkan informasi yang benar dan memadai mengenai calon yang dipilih. Pemateri juga menjelaskan secara rinci tentang proses pemilu yang melibatkan pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara dan penghitungan suara, yang harus dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari kecurangan. Melalui sosialisasi ini, siswa juga diajarkan untuk menghindari berita hoax dan informasi yang menyesatkan, yang sering kali digunakan untuk memengaruhi pilihan pemilih. Pemateri menjelaskan cara mengenali berita hoax dan pentingnya memverifikasi informasi sebelum mempercayainya. Siswa diajarkan untuk menjadi pemilih yang aktif, yang tidak hanya datang ke tempat pemungutan suara, tetapi

juga terlibat dalam diskusi yang sehat dan konstruktif mengenai isu-isu yang dihadapi oleh negara. Partisipasi aktif ini menjadi tanda pemilih yang tidak hanya memilih, tetapi juga menjaga keberlangsungan demokrasi. Etika dalam pemilu juga ditekankan, di mana siswa diajarkan untuk berpolitik dengan santun, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari konflik sosial yang dapat merusak kerukunan masyarakat.

Sosialisasi ini dilakukan dengan metode yang beragam. Salah satunya adalah diskusi interaktif di mana siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan mendiskusikan berbagai aspek pemilu. Selain itu, pemateri dapat menayangkan video edukasi mengenai proses pemilu di Indonesia. Salah satu metode menarik yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah memperkenalkan jingle pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya serta mars Pilkada yang sering digunakan dalam kampanye pemilu lokal. Pemateri akan menjelaskan bagaimana jingle dan mars ini dirancang untuk menarik perhatian masyarakat dan mengingatkan mereka akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Jingle dan mars ini biasanya dipakai dalam kampanye untuk menggerakkan masyarakat agar aktif memilih dan mendukung proses demokrasi yang berlangsung. Selain itu, pemateri juga memperkenalkan maskot-maskot Pilkada, yang biasanya digunakan untuk menarik minat masyarakat, terutama pemilih pemula, agar lebih peduli dan antusias dengan pemilu yang akan datang. Maskot-maskot ini sering kali memiliki desain yang menarik dan mudah diingat, serta dapat digunakan dalam berbagai media kampanye untuk memperkuat pesan-pesan pendidikan politik.

Untuk memberikan pengalaman langsung, pemateri juga bisa mengadakan simulasi pemilu kecil, di mana siswa diberikan kesempatan untuk merasakan bagaimana proses pemilu berjalan, dari pencoblosan hingga penghitungan suara. Ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi pemilih yang lebih siap dan berpengetahuan ketika mereka nantinya diberi kesempatan untuk memilih. Pemateri menekankan pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan dan mengajak siswa untuk mulai memperhatikan isu-isu politik sejak dini. Siswa didorong untuk terus belajar dan memahami proses pemilu agar kelak mereka dapat menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, serta memahami betapa pentingnya peran mereka dalam menentukan masa depan negara.

Diskusi dan Tanya Jawab

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, para siswa menunjukkan antusiasme yang luar biasa dalam memberikan pertanyaan dan berdiskusi mengenai materi yang telah disampaikan. Salah satu faktor yang membuat mereka begitu antusias adalah karena pada tahun 2024, mereka akan memiliki kesempatan untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum untuk pertama kalinya. Ketertarikan mereka semakin meningkat, terutama ketika membahas karakter calon pemimpin yang mereka anggap dapat membawa bangsa ini menuju kemajuan dan perkembangan yang lebih baik. Semangat dan antusiasme yang ditunjukkan oleh para siswa ini mencerminkan adanya peningkatan dalam pemahaman mereka tentang pentingnya ilmu politik dan betapa besar peran mereka sebagai pemilih dalam pemilu. Mereka semakin menyadari bahwa pemilu bukan hanya sekadar hak, tetapi juga kewajiban yang dapat memengaruhi arah masa depan negara. Diskusi yang berlangsung tidak hanya memperkaya pengetahuan mereka, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya mereka berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Pada sesi ini, banyak siswa yang mengajukan pertanyaan yang mencerminkan rasa ingin tahu mereka tentang berbagai aspek pemilu. Salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah, "Bagaimana jika yang memenangkan pemilu adalah kotak kosong?" Menanggapi pertanyaan tersebut, pemateri menjelaskan dengan rinci bahwa, meskipun terkesan aneh, hal ini merupakan kemungkinan yang diatur dalam aturan pemilu di Indonesia. Pemateri

menyampaikan bahwa jika dalam suatu pemilihan umum, baik di tingkat lokal maupun nasional, kotak kosong mendapatkan suara terbanyak, maka pihak pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kelangsungan pemerintahan. Pemilu ulang akan dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga sistem demokrasi tetap berjalan dengan baik, meskipun hasil pemilu tidak menghasilkan pemenang.

Pemateri juga menambahkan bahwa, selama periode tersebut, pemerintah akan menunjuk pejabat sementara untuk mengisi posisi yang kosong hingga pemilu ulang dilaksanakan. Penunjukan pejabat pengganti ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pemerintahan dan tidak mengganggu jalannya negara atau daerah yang bersangkutan. Tentu saja, untuk pemilihan ulang ini, akan ada sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat, khususnya pemilih, mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur, jadwal, dan calon yang akan dipilih. Sosialisasi ini penting agar pemilih tidak bingung dan dapat membuat pilihan yang tepat dalam pemilu ulang nanti. Dengan penjelasan ini, siswa merasa lebih tenang karena mereka memahami bahwa meskipun kotak kosong bisa saja memenangkan pemilu, ada mekanisme yang jelas dan teratur untuk menangani situasi tersebut, dan proses demokrasi tetap akan berjalan sebagaimana mestinya. Siswa juga menyadari bahwa sosialisasi lebih lanjut mengenai hal ini akan dilakukan untuk memastikan semua pihak memahami apa yang perlu dilakukan pada pemilu ulang jika diperlukan.

Di akhir sesi diskusi dan tanya jawab, pemateri menekankan pentingnya pemahaman tentang pemilu dan peran aktif sebagai pemilih, mengingatkan para siswa bahwa hak pilih mereka adalah cara untuk berkontribusi dalam menentukan masa depan negara. Diharapkan, dengan semangat dan antusiasme yang telah ditunjukkan, mereka dapat menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, memahami setiap langkah dalam proses demokrasi. Pemateri juga menambahkan bahwa meskipun ini pengalaman pertama mereka dalam pemilu, pengetahuan yang mereka miliki akan menjadi dasar bagi keputusan di masa depan, sehingga mereka diharapkan untuk terus memperdalam pemahaman politik, menghindari informasi yang menyesatkan, dan memilih dengan bijak. Kegiatan ini diharapkan memberi gambaran jelas tentang cara kerja pemilu, pentingnya partisipasi, dan bagaimana peran mereka dapat menciptakan pemilu yang lebih baik, menunjukkan kesiapan generasi muda untuk menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia.



Gambar 1. Foto Bersama Siswa-Siswi dan Guru SMAK Petra 5 Surabaya

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta proses demokrasi. Antusiasme siswa sangat tinggi, terutama karena mereka akan memberikan hak pilih pertama kalinya pada pemilu 2024. Melalui diskusi, tanya jawab, dan metode interaktif lainnya, siswa menunjukkan kesadaran yang lebih besar tentang peran mereka dalam memilih pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi negara. Sosialisasi ini juga memperkuat semangat mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, siswa diharapkan dapat menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, serta berkontribusi dalam kelangsungan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiani, D., Sri Kartini, D., & Ganjar Herdiansyah, A. (2019). Strategi Sosialisasi Politik Oleh Kpu Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), 18. <https://doi.org/10.24036/scs.v6i1.129>
- DN, S., Soeprapto, A., & Suparno, B. A. (2016). Pengantar Ilmu Politik Membedah Paradigma Politik di Indonesia. In B. A. Suparno (Ed.), *Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta, 2015*. [http://eprints.umm.ac.id/38681/2/BAB I.pdf](http://eprints.umm.ac.id/38681/2/BAB%20I.pdf)
- Hamson, Z. (2021). Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan. *Journal of Communication Sciences (JCoS)*, 4(1), 36–44. <https://doi.org/10.55638/jcos.v4i1.339>
- Kantaprawira, R. (1983). *Sistem politik Indonesia: suatu model pengantar*. Sinar Baru. <https://books.google.co.id/books?id=NU6OAAAAMAAJ>
- Kartono, K. (1989). *Pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa*. Mandar Maju. <https://books.google.co.id/books?id=4hAVtwAACAAJ>
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Pratama, I. N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasi Politik Uang dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia. *Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 1, 761–767.
- Ruslan, U. A. M., Sayyid, S. A., & Murtadho, H. (2000). *Tarbiyah siyasiah: pendidikan politik Ikhwanul Muslimin : studi analisis evaluatif terhadap proses pendidikan politik "ikhwan" untuk para anggota khususnya dan seluruh masyarakat Mesir umumnya dari tahun 1928 hingga 1954*. Era Intermedia. <https://books.google.co.id/books?id=C8-6AAAACAAJ>
- Suhartono, E., Pelly, U., Azhari, I., Etnisitas, U., Iii, B., & Publisher, C. (2019). Rendahnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 ; Suatu Tinjauan Antropologi Politik Low Voter Participation in The 2015 Mayor and Deputy Mayor Election Field ; A Review of Political Anthropology Universitas Nege. *Jurnal Antropologi Sumatera*, 17(1), 12–29.
- Sukmawati, A., & Rafni, A. (2020). Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemuda di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 3(2), 191–199. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i2.349>
- Sumanto, D., & Haryanti, A. (2021). Pendidikan Politik. In *Visipena Journal* (Vol. 7, Issue 1).
- Sumantri. (2018). Sosialisasi Politik Pasangan Calon Kepala Daerah Oleh Kpu Kabupaten Bekasi Pada Pilkada Tahun 2017. *Prosiding Seminar ...*, 1223–1229.

<https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/semnas/article/view/3569>

Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia.

Taufiqurrahman, M., & Amal, B. K. (2022). Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 403.

<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1751>

Zuhri, S. (2010). *Peranan Sekolah dalam Proses Sosialisasi Politik (Studi Penelitian Terhadap Siswa SMA Negeri 2 Semarang)*.

http://eprints.undip.ac.id/23898%0Ahttp://eprints.undip.ac.id/23898/1/SIHABUDIN_ZUHR
I.pdf